Prinsip Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia

Aurelya Tetania Resti Ramadhani¹, H. Lauddin Marsyuni², Hj. Andi Risma³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Surel Koresponden: aureltitaniar@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine that environmental disputes are complex problems and often involve various parties with different interests, including the community, business actors, and the government. In the legal context in Indonesia, the resolution of environmental disputes is regulated by various regulations, especially Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study aims to analyze the legal principles used in resolving environmental disputes in Indonesia, as well as how they are applied in practice. This study uses a normative legal research method. The types and sources of legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal materials were collected through library research, and the analysis of these legal materials involved legal analysis. Although these principles have been accommodated in laws and regulations, their implementation in the field still faces various obstacles, such as weak law enforcement, limited public access to justice, and low environmental awareness. Therefore, it is necessary to strengthen legal institutions and increase public participation in resolving environmental disputes in a fair and sustainable manner.

Keywords: *Environmental Disputes, Legal Principals, Environmental Law, Indonesia.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sengketa lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara kepastakaan (library research), dan adapun analisis bahan hukum ini melakukan analisis hukum. Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, dan rendahnya kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusi hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Sengketa lingkungan, prinsip hukum, penyelesaian sengketa, hukum lingkungan, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut juga dengan milieu atau dalam bahasa Perancis disebut dengan I environment. Apa Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengatur bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Di Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Saat ini pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah semakin parah dan bertambah sehingga kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang mengakibatkan terancamnya kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.³

Melihat fakta dari keadaan hutan Indonesia, deforestasi tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan terjadi hampir di setiap region. Region Kalimantan misalnya, masih menunjukkan nilai rata-rata deforestasi sebesar 1,11 juta hektare per tahun, diikuti Papua 556 ribu hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 ribu hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektare per tahun, dan Jawa 22 ribu hektare per tahun.⁴

¹ Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ <https://www.mongabay.co.id/2024/06/05/hari-lingkungan-hidup-2024-degradasi-lahan-membuat-kehidupan-masyarakat-dunia-terancam/>

⁴ R, R. (2024, June 5). *Hari Lingkungan Hidup 2024: Degradasi Lahan membuat kehidupan masyarakat dunia terancam*.

Kerusakan hutan-hutan di Indonesia yang rupanya sangat masif ini terkuak dengan makin canggihnya teknologi penginderaan jauh yang mampu menghitung kerusakan hutan lebih detail. Fenomena lain dapat membuktikan kepada kita bahwa banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor, belum lagi Lumpur Lapindo yang tak berhenti menyembur, kemudian kebakaran hutan yang dipastikan menjadi tamu tetap bangsa ini apabila kemarau tiba.⁵

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)..” (QS. Ar-Rum: 41)

Ayat diatas menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kerusakan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada kehidupan manusia itu sendiri, sehingga penting untuk menjaga kelestarian alam. Dengan memahami ayat diatas, kita diingatkan akan pentingnya menjaga lingkungan dan berdoa kepada Allah dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai makhluk-Nya.

Sebagai tanggapan terhadap berbagai kerusakan lingkungan tersebut, muncul konflik lingkungan hidup, dan kelompok-kelompok yang peduli dengan lingkungan dan korban berusaha untuk menuntut penegakan hukum. hukum lingkungan dalam upaya melindungi hak-hak mereka.

Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut, pemerintah akhirnya mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH), dimana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶

Untuk mencegah berbagai kerusakan alam akibat ulah para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, masyarakat intelektual pun mengusulkan satu solusi agar para pengusaha yang cenderung merusak alam lingkungan hidup dengan pertanggungjawaban langsung atau tanggung gugat

⁵ Aulia, O. D., Apriani, I., Juanda, A., Barri, M. F., Dewi, R. W., Muharam, F. N., ... & Condro, A. A. (2023). Refining National Forest Cover Data Based on Fusion Optical Satellite Imageries in Indonesia. *International Journal of Forestry Research*, 2023(1), 7970664.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mutlak yang di kenal dengan strict liability. Penerapan asas tanggung gugat mutlak lazimnya dibarengi dengan ketentuan beban pembuktian terbalik (omkeringder bewijslast), kewajiban asuransi dan pembuktian plafond (ceiling) yaitu batas maksimum ganti kerugian.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) tidak memberi pengaturan tentang beban pembuktian terbalik dan kewajiban asuransi. UUPPLH hanya menetapkan batas maksimum ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH menyebutkan, Pengertian bertanggungjawab secara mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemaran atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan hidup muncul ketika antara masyarakat dengan pelaku perubahan tidak satu visi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 butir 25 (UUPPLH) mengatur bahwa: "sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup." mengakibatkan ancaman kerusakan lingkungan secara serius serta menimbulkan kerugian penggugat, tanpa ada unsur kesalahan.

Tanggung jawab mutlak pertama tama dikenal di Indonesia dengan adanya ratifikasi atas Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) pada tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978, ratifikasi itu kemudian dicabut pada tahun 1998. Kemudian dibuatlah Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi, lalu dibuatlah Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang berlaku hingga sekarang. Konsep tanggung jawab mutlak, sejak ratifikasi, hingga tiga kali berubahnya undang-undang tentang lingkungan hidup, selalu dicantumkan.

Tahun 2003 ada putusan pengadilan tentang tanggung jawab mutlak pertama di Indonesia yang menerapkan tanggung jawab mutlak untuk menghukum tergugat. Putusan Pengadilan

⁷ Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona* Ed 4. Airlangga University Press.

Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.⁸

Terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. sehingga diperlukan adanya sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Kegiatan atau usaha yang berlaku tanggung jawab mutlak adalah kegiatan yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan.

Maka dari itu karya ilmiah ini penulis hanya menfokuskan pembahasan dengan judul “Prinsip Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia”.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian Pustaka (*Library Research*) yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur kemudian menuliskan dan mengklarifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data.⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut: Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang berkekuatan hukum serta mengikat, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan selaras mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa dokumen kepustakaan seperti hasil penelitian, artikel, literatur, jurnal dan media informasi lainnya di internet yang juga menjadi tambahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau keterangan dan penjelasan bahan hukum

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg

⁹ Soerjono Soekanto. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 1.

primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan sosial pekerja serta relevan dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dengan cara melakukan analisis pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh Gambaran yang sistematis kemudian disusun secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia

Pasal 1 angka 25 UUPPLH menyatakan sengketa lingkungan hidup sebagai “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Pengertian ini jelas berbeda jauh dari penyebab sengketa menurut Pasal 1 angka 19 UUPPLH (UU. No. 23 Tahun 1997) yang menyatakan, bahwa sengketa lingkungan hidup itu muncul karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, penyebab terjadinya sengketa lingkungan hidup itu jelas, yaitu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹⁰ Sekarang dalam UUPPLH sengketa itu timbul baik dari kegiatan yang berpotensi maupun yang sudah menimbulkan dampak pada lingkungan hidup. Ini karena kata sambung dan/ atau itu dapat saja ditafsirkan bahwa kegiatan dan/atau usaha yang misalnya baru dianggap sebagai berpotensi menimbulkan dampak dapat menjadi sebab terjadinya sengketa lingkungan hidup. Tampaknya tentang ini perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dari kalangan pemerintah. Diperlukan kriteria hukum yang jelas mengenai “kegiatan yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak itu”. Semua kegiatan dan/atau usaha memang punya potensi membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup (termasuk yang sudah punya izin lingkungan, bila mereka sengaja melanggar izin itu, melanggar peraturan perundangan lain atau bertindak sembrono). Ini nantinya juga ada kaitan dengan soal tanggung jawab mutlak, tanggung jawab tanpa adanya unsur kesalahan itu. Kalau semua kegiatan asal dianggap begitu saja sebagai berpotensi menimbulkan dampak, maka jelas akan ada banyak sengketa. Masyarakat misalnya dapat saja beramai-ramai mengadakan *class action* (gugatan perwakilan) terhadap semua kegiatan dan/atau usaha apa pun yang menurut anggapan mereka berpotensi membawa dampak bagi lingkungan hidup. Padahal belum tentu ada potensi itu,

¹⁰ Pasal 1 UU no 23 Tahun 1997

dan juga kalau baru potensi saja, dan belum membawa dampak alias belum terjadi pelanggaran hukum, maka belum ada dasar yang kuat membikin sengketa lingkungan hidup atau menggugat. Maka kriteria yang jelas mengenai kegiatan yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak itu sangat diperlukan.¹¹ Ini bertujuan agar tidak muncul penilaian sepihak dan sembrono serta ramai-ramai membuat sengketa dari masyarakat terhadap suatu kegiatan. Di samping itu, perlu juga diperhatikan konsistensi hal itu dengan pengertian dampak lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 26 UUPPLH. Di situ disebutkan, bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Jadi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup adalah berpotensi menimbulkan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup. Tidak begitu jelas, apakah pengaruh perubahan itu hanya yang bersifat negatif atukah juga termasuk yang positif. Meskipun demikian, dapat dikatakan, bahwa konotasi pengaruh tersebut adalah yang negatif, karena setiap kali orang berbicara tentang dampak, yang dimaksud adalah dampak negatif. Bisa saja, bahwa pengaruh perubahan itu sendiri belum terasa atau belum ada dan orang sudah secara gegabah bersengketa tentangnya.¹² Seharusnya tidak demikian, karena kalau demikian akan disebut sebagai sengketa yang “tidak berdasar”. Maka sebetulnya kurang pas secara hukum, bila hanya potensi saja (belum ada aktualitas dampaknya) sudah ada sengketa. Betapa repotnya pengadilan negeri nanti, jika setiap hari ada gugatan yang masuk lantaran orang atau masyarakat menganggap semua kegiatan atau usaha memiliki potensi membawa dampak bagi mereka dan lingkungan hidup. Hal tersebut tentu berbeda dari sudah jelas menimbulkan dampak (negatif) bagi manusia dan lingkungan hidup, misalnya berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Demikian pula dengan ancaman serius sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 34 UUPPLH telah menjadi kenyataan.¹³ Ini jelas dan masuk akal dapat menimbulkan sengketa. Meskipun demikian, adanya sengketa itu sendiri tidak identik dengan telah sungguh-sungguh terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk dapat disebut sebagai telah terjadi pencemaran atau perusakan dan kerusakan lingkungan hidup ada ukurannya, yaitu telah “melampaui Baku Mutu Lingkungan (BML, baik ambien maupun efluen) dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL) yang ditetapkan pemerintah. Pelanggaran terhadap kedua hal itu pun yang masih perlu dibuktikan di pengadilan dan hal inilah yang tidak gampang dilakukan penggugat yang kemudian menjadi alasan perlu adanya tanggung jawab mutlak, yaitu

¹¹ Pasal 22 ayat 2 UUPPLH

¹² Anand Ghanasham (2024). MARKET SHARE LIABILITY. Jakarta: Setara Press. Hlm. 129

¹³ Pasal 1 Angka 34 UUPPLH

kesalahan dalam hal pelanggaran BML dan KBKL tidak perlu dibuktikan. Jadi orang boleh saja bersengketa tentang hal ini, namun apakah sungguh telah ada dampak negatif tersebut dan menimbulkan kerugian, masih perlu dibuktikan. Lepas dari apakah nantinya ini dapat dibuktikan ataukah tidak, yang jelas masuk akal hal itu adalah penyebab sengketa. Berkaitan dengan pengertian sengketa lingkungan hidup tersebut, perlu pula ditegaskan di sini tentang pengertian “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”. UUPPLH memang tidak menyebutkannya, namun pengertian tentang itu dapatlah dikatakan sebagai “prosedur atau cara sistematis yang dilalui untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (atau menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih tadi karena kegiatan yang berpotensi dan/atau yang sudah menimbulkan dampak)”. Dalam UUPPLH sendiri prosedur atau cara itu dapat ditempuh baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (lihat Pasal 84 ayat (1) dan (2)). Melalui pengadilan dapat dilakukan melalui proses peradilan perdata atau pidana dan PTUN. Sedang di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter (Pasal 85 ayat (3)). Baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan proses penyelesaian sengketa itu mengikuti ketentuan hukum yang masih berlaku. Khusus mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 tentang gugatan kerugian dan pemulihan lingkungan, Pasal 88 tentang tanggung jawab mutlak, Pasal 89 tentang kadaluwarsa pengajuan gugatan, Pasal 90 tentang hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, Pasal 91 tentang hak gugat masyarakat, Pasal 92 tentang hak gugat organisasi lingkungan hidup, dan Pasal 93 tentang gugatan administratif. Selain gugatan administratif yang menggunakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), gugatan-gugatan keperdataan yang lain menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku.¹⁴ Ada beberapa kasus yang berhasil menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak di dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia Seperti kasus PT. Lapindo brantas di sidoarjo pada 2006. Hal ini di tertuang pada putusan nomor 83/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Semburan lumpur panas akibat pengeboran tanah yang dilakukan PT. Lapindo Brantas. Tuntutan dari pemerintah untuk kerugian sosial dan lingkungan, meski proses aspek pidana belum selesai PT. Lapindo Brantas secara moral dan administrative diwajibkan memberikan kompensasi dan melakukan pemulihan, berdasarkan prinsip hukum tanggung jawab mutlak.¹⁵

¹⁴ UUPPLH

¹⁵ PUTUSAN Nomor 83/PUU-XI/2013

B. konsep prinsip hukum tanggung jawab mutlak di dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia

Gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan adalah gugatan yang timbul sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). Hal ini diketahui dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan dengan jelas, bahwa ketentuan tersebut merupakan realisasi dari prinsip atau asas pencemar membayar (polluter pays principle). Prinsip tersebut mulai tahun 1971 dikembangkan oleh negara-negara anggota Organization of Economic Cooperation and Development/OECD dan Masyarakat Eropa (Uni Eropa) yang pada intinya menyebutkan, bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkannya.¹⁶ Prinsip ini sebetulnya adalah suatu prinsip ekonomi dalam pencegahan atau penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dikatakan Philippe Sands sebagai berikut: *The practical implications of the polluter-pays principles are in its allocation of economic obligations in relation to environmentally damaging activities, particularly in relation to liability, the use of economic instruments, and the application of rules relating to competition and subsidy.*¹⁷ Selain prinsip ekonomi itu, prinsip ini juga berkaitan dengan tanggung jawab mutlak dari si pencemar (potensi) lingkungan hidup. Artinya prinsip ini tidak semata-mata soal membayar saja, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas. Menurut Reiner Schmidt prinsip ini juga terdiri dari penetapan peraturan perundangan yang berisi kewajiban dan tanggung jawab (liability) mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, atau sebagai sebuah prinsip pencegahan (Verursacherprinzip).¹⁸ Pada Pasal 42 dan 43 UUPPLH diatur mengenai instrumen ekonomi yang bersifat preventif bagi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Instrumen ekonomi inilah yang rupanya lebih sesuai dengan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) dalam teori OECD atau pendapat P. Sands dan Schmidt di atas. Yaitu membayar bukan karena telah mencemarkan (apalagi membayar untuk mencemari), melainkan kewajiban menyediakan dana bagi pencegahan dan

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, 1987, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya. Hal. 150

¹⁷ Philippe Sands, 1995, Principles of International Environmental Law (Vol. 1). Frameworks, Standards and Implementations, Manchester University Press, hlm. 213

¹⁸ Reiner Schmidt, 1992, Einführung in das Umweltrecht (Pengantar Hukum Lingkungan) (3 Auflage), München, CH.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, hlm. 5.

penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sementara itu, prinsip pencemar membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan penjelasannya tadi adalah sanksi hukum (keperdataan), yaitu membayar karena tergugat terbukti secara hukum (di pengadilan) bersalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian kepada penggugat. Sebaliknya juga, apabila tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut (atau penggugat gagal membuktikan), maka ia pun tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat dan tidak berkewajiban pula untuk melakukan pemulihan lingkungan. Di situlah sebetulnya letak persoalan mengapa gugatan perbuatan melanggar hukum (yang menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata) dan kewajiban penggugat membuktikan unsur kesalahan –sebagai salah satu unsur perbuatan melanggar hukum– menyulitkan penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian. Penggugat harus membuktikan unsur-unsur peristiwa atau perbuatan melanggar hukum seperti adanya pelanggaran hak-hak (asasi) mereka, kelalaian tergugat menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundangundangan lingkungan, kecerobohan tergugat sendiri (pelanggaran terhadap asas kehati-hatian), adanya kesalahan, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau kesalahan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Ini semua tidak gampang dibuktikan. Dalam kasus Lapindo Brantas Inc., misalnya, yang menurut pendapat hukum Suparto Wijoyo sebetulnya dapat diterapkan strict liability, penggugat (warga korban lumpur panas) mengalami kesulitan pembuktian. Sebagaimana diketahui umum, bahwa akhirnya kasus Lapindo dinyatakan sebagai bencana alam.¹⁹ Dalam kasus yang begitu besar itu dengan mudah dikatakan hanya sebagai “bencana alam”, dan ini tentu cukup melukai perasaan keadilan “substansial” masyarakat korban peristiwa itu. Karena sulitnya pembuktian mengenai perbuatan melanggar hukum tersebut, dan juga kurang memberikan keadilan bagi penggugat –karena selain sudah menjadi korban masih dibebani lagi dengan kewajiban yang berat, dan ditambah kelemahan posisimaka UUPPLH menyediakan sebuah konstruksi hukum berupa tanggung jawab mutlak (Pasal 88). Unsur-unsur tanggung jawab mutlak dalam pasal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pertama, adalah setiap orang, kelompok orang, dan juga termasuk badan hukum seperti perusahaan industri. Agak sulit dikatakan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah termasuk juga dalam kategori “setiap orang”, sebab ternyata pemerintah termasuk pihak yang juga mempunyai hak menggugat (Pasal 90).

¹⁹ Suparto Wijoyo, “Pendapat Hukum Kasus Lumpur Panas Lapindo”, dalam Sudarsono (ed.), 2007, Negeriku Menuai Bencana Ekologi, Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan, PPLH Regional Jawa Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 2007, hlm. 339.

Pemerintah hanya dapat digugat secara administratif (Pasal 93) yang tata caranya mengacu pada Hukum Acara PTUN. Kedua, tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Ini adalah unsur penting dalam tanggung jawab mutlak sebagaimana disebutkan dalam teori, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang mengandung bahaya atau risiko besar. Mengenai B3 ini sudah ada aturannya tersendiri, yaitu dalam PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1999. Pasal 7 ayat (2) PP No. 85 Tahun 1999 mencantumkan karakteristik B3 sebagai: yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan bersifat korosif. Untuk mengetahui jenis-jenis B3 dapat dilihat dalam lampiran PP tersebut. Artinya mengenai kepastian, apakah suatu bahan atau limbah itu B3 atau bukan, dapat dicaritahu dalam PP itu sendiri, kecuali ada penemuan baru mengenai B3 yang belum ada dalam PP itu. Ketiga, berkaitan dengan yang kedua di atas, pada Pasal 88 itu disebutkan juga selain menggunakan juga “menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3”. Dengan demikian, untuk bertanggung jawab mutlak tidak hanya bahwa orang menggunakan B3, melainkan tidak menggunakannya, namun kegiatannya justeru menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3. Atau bisa juga duanya yaitu menggunakan dan sekaligus menghasilkan limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang konsentrasi atau jumlahnya secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 2 PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999). Baik menggunakan B3 maupun menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3 mengandung potensi bahaya, risiko atau ancaman serius terhadap manusia dan lingkungan hidup.³⁵ Dengan demikian –sesuai teori tanggung jawab mutlak di atas- hal ini sudah dapat menimbulkan tanggung jawab atau yang dalam ketentuan UUPPLH dapat memunculkan sengketa lingkungan. Ketika hanya potensi bahaya atau risiko (namun belum menimbulkan kerugian) sudah dapat menimbulkan sengketa yang menggunakan tanggung jawab mutlak, maka pengadilan akan menjadi sibuk, dan industri tidak akan merasa aman. Keempat adalah ancaman serius sebagaimana disinggung di depan. Agar tanggung jawab mutlak dapat berlaku, tentu saja harus ada ukuran atau kriteria ancaman serius tersebut. Kegiatan yang menggunakan B3 adalah salah satu contoh ancaman serius, apalagi kalau penanganan atau pengelolaannya tidak sesuai persyaratan teknis yang ditentukan. Demikian pula, bila pengawasan terhadap B3 tidak dilakukan secara baik atau ketat oleh pemerintah.³⁶ Ancaman serius atau potensi bahaya tersebut cukup luas cakupannya. Industri Batik di sepanjang sungai

Pekalongan (Jawa Tengah) yang membuang limbah secara ngawur di sungai itu misalnya, berpotensi bahaya, atau ancaman serius bagi sungai dan manusia di situ. Demikian pula mulai dari hanya B3 sampai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga berbahaya. Maka dirasa perlu dibuat kriterianya yang jelas yang ditentukan dalam aturan yang jelas. Maksudnya agar penerapan tanggung jawab mutlak tidak mengalami hambatan. Akhirnya unsur kelima adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini adalah unsur yang penting bahkan sentral dalam tanggung jawab mutlak. Yang sering jadi pertanyaan adalah, apakah kalau penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan tergugat itu otomatis berarti tergugat pasti bersalah dan karenanya harus bertanggung jawab mengganti kerugian? Jika demikian halnya, maka apakah tanpa pembuktian unsur kesalahan itu “identik dengan asas praduga bersalah”? Tampaknya tidak demikian. Belum tentu secara riil tergugat sungguh-sungguh bersalah. Dalam pembalikan beban pembuktian, ia diminta untuk membuktikan sebaliknya, bahwa kerugian tergugat bukan karena perbuatannya, melainkan karena halhal lain, seperti bencana alam dan sebagainya. Di sini ia membela diri, bahwa ia tidak bersalah (Pasal 35 ayat 2 UUPPLH). Tampaknya tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UUPPLH tidak lagi memungkinkan tergugat berdalih dengan acuan pada peristiwa-peristiwa alam dan sebagainya. Ketidakjelasan dalam rumusan normatif “tanpa pembuktian unsur kesalahan” itu masih menimbulkan pertanyaan, apakah unsur-unsur lain dari perbuatan melanggar hukum masih harus dibuktikan, seperti adanya pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban, ketidakhati-hatian, dan terutama hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian? Ini dipertanyakan, karena gugatan sengketa lingkungan adalah gugatan perbuatan melanggar hukum yang secara teoretis memiliki unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut. Kalau unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, maka seharusnya unsur-unsur yang lain (yang berkaitan dengan kesalahan tergugat) juga tidak perlu lagi dibuktikan. Sebab, kalau masih harus dibuktikan unsur-unsur lain itu, tidak ada gunanya tanggung jawab mutlak tersebut, karena pada akhirnya tetap menyulitkan pihak korban atau penggugat, apalagi kalau penggugat tidak bisa membuktikan unsur-unsur lain selain unsur kesalahan itu. Seperti disinggung dalam landasan teori di muka, bahwa meskipun unsur kesalahan ini tidak perlu dibuktikan oleh penggugat, namun penggugat tetap harus membuktikan, bahwa dirinya memang mengalami kerugian riil. Tentang kerugian ini memang tidak disebutkan dalam pasal tersebut di atas, apakah bagi manusia saja ataukah juga bagi lingkungan hidup. Di sini kerugian itu dilihat sebagai kerugian bagi keduanya (ini jelas dari jenis gugatan, yaitu gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan). Tanggung jawab mutlak dalam pasal tersebut di atas tidak lagi mencantumkan unsur-unsur pemaaf atau alasan-

alasan pembebasan tanggung jawab seperti yang pernah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUPPLH. Dengan tidak ada lagi alasan-alasan pembebas itu, maka tergugat tidak lagi memiliki kesempatan untuk berdalih, bahwa kerugian penggugat bukan perbuatan atau kesalahannya, melainkan akibat alasan-alasan pembebas tanggung jawab itu. Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UUPPLH tersebut dapatlah dikatakan di sini, bahwa tanggung jawab mutlak tersebut memang tidak jauh berbeda dari teori tanggung jawab mutlak sebagaimana disebutkan di depan. Di samping itu, tampaknya memang tanggung jawab mutlak ini bertujuan hendak meringankan beban pembuktian penggugat/korban kasus-kasus lingkungan yang bersifat *extrahazardous* (luar biasa berbahaya). Hanya saja, ketentuan tersebut masih perlu diperjelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia mengacu pada berbagai prinsip hukum lingkungan yang telah diadopsi baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam praktik peradilan. Prinsip-prinsip utama. Prinsip tanggung jawab mutlak, yang memungkinkan pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam hal kegiatan yang dilakukan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁰. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle), yang mengharuskan semua pihak untuk mengambil tindakan pencegahan dalam kondisi ketidakpastian ilmiah guna mencegah kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat diperbaiki.²¹ Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), yang menyatakan bahwa pihak yang mencemari lingkungan wajib menanggung biaya penanggulangan dan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan. Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan agar keberlangsungan generasi mendatang tetap terjamin.²² Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Jalur litigasi sering digunakan dalam kasus yang bersifat strategis atau berdampak luas, seperti pencemaran sungai, kebakaran hutan, dan pencemaran udara. Sementara itu,

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 45.

²² *Ibid.*, hlm. 49.

penyelesaian non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi lebih sesuai untuk konflik yang bersifat lokal atau sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Kedua jalur ini saling melengkapi dan diatur dalam sistem hukum nasional, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan aksesibilitas.²³ Meskipun prinsip-prinsip hukum lingkungan telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya dalam praktik masih belum optimal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain. Rendahnya pemahaman dan kapasitas penegak hukum dalam menangani perkara lingkungan hidup, terutama dalam menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak yang seringkali tidak dijadikan dasar utama dalam pertimbangan hakim. Proses pembuktian dalam perkara lingkungan yang sangat kompleks, membutuhkan data ilmiah dan teknologi yang tidak selalu tersedia bagi masyarakat terdampak. Ketimpangan kekuatan antara korporasi besar dan masyarakat lokal yang sering kali menyebabkan ketidakadilan struktural dalam penyelesaian sengketa. Belum maksimalnya pemulihan lingkungan pasca putusan pengadilan, karena lemahnya pengawasan dan keterbatasan eksekusi terhadap ganti rugi atau tindakan pemulihan yang telah diperintahkan. Adanya kebutuhan untuk memperkuat pendekatan hukum lingkungan yang berbasis pada keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat. Dalam jangka panjang, penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif bukan hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh pembentukan budaya hukum lingkungan yang kuat di semua sektor mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

D. UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendoakan untuk penulis dalam menempuh pendidikan dengan tiada henti agar mencapai kesuksesan, terima kasih kepada para dosen pembimbing atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan karya ini sampai selesai, dan terima kasih untuk para teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan doa. Dan terimakasih kepada sahabat-sahabat atas semangat dalam proses pembuatan karya ini.

REFERENSI

AL-Qur'an dan Terjemahannya.

²³ Haryono, *Hukum Lingkungan dan Sengketa Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

Amriani, Nurmaningsih. (2012). *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press.

Aulia, O. D., Apriani, I. (2023). Refining National Forest Cover Data Based on Fusion Optical Satellite Imageries in Indonesia. *International Journal of Forestry Research*, 2023(1), 7970664.

Danusaputro, M. (1985). *Hukum lingkungan buku II. Nasional*.

Dr. Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Dwi Adhi Prasetyo, "Prinsip Strict Liability,"

Harahap , M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Keraf A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kompas.

Koesnadi Hardjasoemantrim. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press. Yogyakarta.

Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surya Kencana Dua, 7.

Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.

Nurmaningsih, A. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 45.

Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat*. Hlm. 45

Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona*l Ed 4. Airlangga University Press.

Rembet, R. C. (2020). *Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972*. *Lex Et Societatis*, 8(4).

Santosa, M. A., & Rahmadi, T. (1997). *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) di bidang lingkungan hidup*. ICEL.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.

Soerjono Soekanto. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Wilsa, S. H. (2020). *Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)*. Deepublish.

Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg

R, R. (2024, June 5). *Hari Lingkungan Hidup 2024: Degradasi Lahan membuat kehidupan masyarakat dunia terancam*. Mongabay.co.id.
<https://www.mongabay.co.id/2024/06/05/hari-lingkungan-hidup-2024-degradasi-lahan-membuat-kehidupan-masyarakat-dunia-terancam/>